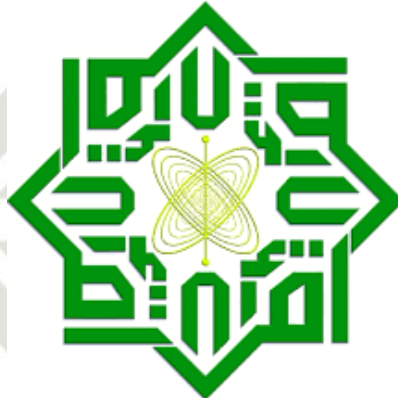


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAHAN DAERAH NOMOR  
58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2016-2017**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**MADINAH PANDIANGAN**

**NIM: 11527205087**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2019**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAHAN DAERAH NOMOR  
58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2016-2017**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi salah satu syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Hukum  
di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Sultam Syarif Kasim**



OLEH:

**MADINAH PANDIANGAN**

**NIM: 11527205087**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2019**

## PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *"Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggran 2016-2017"*

Nama : MADINAH PANDIANGAN


NIM : 11527205087

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Januari 2020

Pembimbing Skripsi

  
**BASIR, S.H., M.H.**  
NIK.130217026

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ PELAKSANAAN ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAHAN DAERAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016-2017” yang ditulis oleh :

Nama : MADINAH PANDIANGAN  
NIM : 11527205087  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 16 Maret 2019  
Waktu : 08.00 Wib  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2020M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr.H.Magfirah,MA**

Sekretaris  
**Musrifah,SH,MH**

Penguji I  
**Basir, S.HI., MH**

Penguji II  
**Firdaus,SH.,MH**

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 1968031 005  
**PENGESAHAN**

## ABSTRAK

Madinah pandiangan (2019) : Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016-2017.

Penelitian di latar belakang oleh Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016-2017. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 58 Tahun Anggaran 2016-2017 dan apa faktor penghambat Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun batasan masalah yaitu pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD serta jumlah sample adalah 3 responden dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Lokasi penelitian yaitu Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah tahun Anggaran 2016-2017 belum terlaksana dengan sempurna, efisien, efektif dan ekonomis sebagai mana semestinya. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor penyebab kurang terlaksananya Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah seperti hambatan kurangnya birokrasi, keterbatasan kemampuan dalam sumber daya manusia yang sering kali dihadapi pegawai yang dibutuhkan sering tidak berada di tempat dan dilatar belakang kurangnya komunikasi antar sesama bidang SKPD. Dalam penelitian ini yaitu kurang terlaksananya Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah tahun Anggaran 2016-2017.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segenap puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan kasih dan sayangNya kepada penulis berupa kesehatan, kesabaran, dan nikmatnya yang luar biasa serta ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan syalawat dan salam untuk junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad SAW, sebagai revolusioner islam, penyebar risalah-risalah Allah SWT dan sebagai pilar penegak janji-janji islam dipermukaan bumi ini, dengan mengucapkan *Allahuma sholli'ala sayyidina Muhammad wa'ala ali syaiddina Muhammad*,

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam bentuk tenaga, pikiran serta materi demi terciptanya tugas penulisan dan penelitian skripsi ini sesuai dengan apa yang penulis harapkan. Kiranya dengan terciptanya penelitian ilmiah ini, diharapkan mampu berkontribusi dalam menambah khasanah keilmuan penulis khususnya, maupun kepada pihak yang membaca penelitian ini pada umumnya.

Kemudian daripada itu penulis tidak lupa pula menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Membang Pandiangan dan ibunda Murni Simamora serta Adinda Elvi Sahuri Pandiangan, Rini Pandiangan, Sahat Maruli Ganda Pandiangan dan Dwita Pandiangan yang selalu bersabar dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan doa dan semangat serta dukungan baik moril maupun materil

2. Bapak Prof.DR.H.Akhmad Mujahahidin, S.Ag.M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr.Drs. Hajar, M.Ag Dekan Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag Wakil Dekan II, dan Bapak Dr.H. Maghfirah, MA Wakil Dekan III yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Firdaus SH.MH sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Muslim SH sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ilham Akbar S.HI,SH,MH selaku pembimbing Akademik penulis selama menjalani masa perkuliahan.
6. Bapak Basir,S.HI,MH sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen dan segenap civitas akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu penulis selama kuliah di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Segenap staf pegawai perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meminjamkan buku kepada penulis.
9. Bapak Hasan Basri Harahap selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah yang telah membantu memberikan masukan mengenai penelitian ini.
10. Kepada saudara Margareta Helyaristianti SH, Puji Astuti SH, Junila SH, Mizda Pooja Delson, Rita Sianipar dan saudara Emel Salim, Jumfirtiadi yang berjasa meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan memotivasi selama penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya selaku penulis, memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kata pengantar yang penulis persembahkan baik dari segi tata Bahasa maupun serta etimologis. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat dan memperkaya ilmu bagi kalangan pembaca.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*



Pekanbaru, 04 september 2019

Penulis

**MADINAH PANDIANGAN**  
**NIM.11527205087**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II      GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Kabupaten Labuhan Batu Selatan .....	19
B. Letak Geografis .....	21
C. Keadaan Demokrasi .....	22
D. Jumlah Penduduk .....	23
E. Mata Pencarian.....	23
F. Tingkat Pendidikan .....	24
G. Agama .....	27
H. Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Selatan .....	27



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A.	Implementasi .....	31
1.	Faktor Keberhasilan .....	31
B.	Pengertian <i>Good Governance</i> .....	34
1.	Pengertian <i>Good Governance</i> .....	34
2.	Karakteristik <i>Good Governance</i> .....	34
3.	Unsur <i>Good Governance</i> .....	36
4.	Asas-asas <i>Good Governance</i> .....	39
C.	Pemerintahan Daerah .....	40
D.	Otonomi Daerah .....	41
E.	kinerja.....	43
F.	Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	45
1.	Pengertian Anggaran .....	45
2.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	47
G.	Karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	46
H.	Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	50
I.	Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	52
J.	Efisiensi Anggaran dan Belanja Daerah .....	52

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Berdasarkan Peraturan
----	--



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Pemerintahan Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tahun Anggaran 2016/2017 ....	52
C.	Faktor Penghambat Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan.....	62

## BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	70

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 1.1</b> : Realisasi Anggaran Kabupaten Labuhan Batu Selatan 2016-2017	11
<b>Tabel 1.2</b> : Populasi dan Sampel .....	15
<b>Tabel 2.1</b> : Luas wilayah Labuhan Batu Selatan Berdasarkan Kecamatan	22
<b>Tabel 2.2</b> : Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhan Batu Selatan .....	23
<b>Tabel 2.3</b> : Mata Pencaraian Masyarakat Labuhan Batu Selatan .....	24
<b>Tabel 2. 4</b> : Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan.....	25
<b>Tabel 2. 5</b> : Jumlah sarana Pendidikan di Labuhan Batu Selatan .....	26
<b>Tabel 2.6</b> : Jumlah Agama di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.....	27



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa Negara Indonesia itu adalah suatu Negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah didalam lingkungannya yang juga berbentuk Negara. Daerah Indonesia dibagi juga menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah bersifat otonom atau bersifat administratif belaka. Semuanya menurut aturan yang akan di tetapkan dengan di Undang-Undang. Di daerah yang bersifat otonom diadakan Badan Perwakilan Daerah karena di daerah pun pemerintahan akan bersendikan dasar permusyawaratan.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah menurut Asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa suatu sistem pembagian keuangan yang adil,

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.123

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proporsional, Demokratis, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan.<sup>3</sup>

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berlakunya kedua Undang-Undang ini memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada, baik menyangkut sumber daya manusia dan maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintahan daerah tersebut didukung sumber pembiayaan yang memadai. Didasari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lain sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan fungsi pemerintah yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Didasari bahwa sumber-sumber penerimaan antara satu daerah dengan lainnya sangat beragam. Sesuai Undang-Undang Nomor 33 tahun

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

<sup>4</sup> C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.152

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2004 Pasal 10 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (capital investmet), antara lain berasal dari dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Disamping dana perimbangan yang berasal dari pusat, daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, BUMD dan lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini lah yang sebenarnya menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini, kemandirian daerah dapat diwujudkan lewat struktur PAD yang kuat. Adanya kewenangan yang lebih besar memberikan peluang kepada daerah menggali berbagai potensi daerah dan mengoptimalisasi berbagai sumber daya yang dimiliki dan pada gilirannya dapat mendorong tercapainya kemampuan keuangan yang lebih baik. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 6 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.<sup>5</sup>

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun di tetapkan dengan peraturan daerah

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Nomor.58 tahun 2005 pasal 6 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 (1) tentang Asas Umum Pengelolaan Daerah yang berbunyi Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat<sup>6</sup>. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu sendiri terdiri atas pendapatan daerah belanja daerah dan pembiayaan yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri bagi pemerintah.

Otonomi Daerah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelolah daerahnya. Daerah harus menjadi lebih mandiri sehingga mampu mengurangi ketergantungannya kepada pemerintahan pusat.<sup>7</sup>

Halim menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi yaitu:<sup>8</sup>

1. Kemampuan keuangan daerah

Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminim mungkin pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan tersebar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2015 pasal 4 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>7</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: 2002), h.66

<sup>8</sup> Halim Abdul, *Akutansi Sector Public: Akutansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat 2002), h. 23



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih besar. Namun pada kenyataannya sudah 12 tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (8) tentang Desentralisasi merupakan wujud pemberian kewenangan yang lebih luas dari Pemerintahan Pusat ke Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan semua urusan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka membangun, mengelola, mengendalikan, dan mengevaluasi segala sumber daya dalam rangka mendorong Pemerintahan Daerah untuk lebih memperdayakan semua daerahnya.

Anggaran Daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunan anggaran dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perda) melibatkan dua pihak yakni Eksekutif dan Legislatif. Eksekutif sebagai pelaksana operasional daerah berkewajiban membuat draft/ rancangan APBD yang hanya bisa diimplementasikan apabila sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran.

Lingkup APBD menjadi penting dilingkungan Pemerintahan Daerah. Hal ini terkait dengan dampak APBD terhadap kinerja pemerintah., sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja anggaran adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan perimbangan beban kerja (*work load*) dan unit (*cost*) dari setiap kegiatan yang terstruktur. Kinerja anggaran pemerintah daerah selalu dikaitkan dengan bagaimana sebagai unit kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia. Analisis kinerja anggaran dapat dilakukan dengan sebagai metode, antara lain dengan menggunakan metode rasio keuangan (*financial ratio*) metode *economic value added* /EVA (di Indonesia metode tersebut dikenal dengan metode *NITAMI* / nilai tambahan ekonomi), *balance scorecard*, *value for money* dan analisi anggaran.

Era Otonomi Daerah, terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah di beri kewenangan untuk menyelenggarakan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan cerminan dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program-program yang akan di laksanakan oleh pemerintahan daerah selama priode tertentu. APBD dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. Halim (2002) mengungkapkan bahwa laporan keuangan di maksud kan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan.<sup>10</sup>

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemma dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.<sup>11</sup>

Politik anggaran bermakna proses saling mempengaruhi, saling meyakinkan antara sesama mitra kerja dalam menentukan besaran jumlah Alokasi Anggaran dan prioritas program yang di biayai dengan uang publik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Politik anggaran sering muncul dalam bentuk wujud atau kekuatan dan kekuasaan politik antara berbagai pihak yang terlibat dan yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan publik yang tertuang dalam bentuk Undang-Undang untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contoh yang paling konkrit

<sup>10</sup> Halim, Abdul, *Akutansi Sector Public Pengelolahan Keuangan Daerah*, edisi 3 ,(Jakarta: 2002),h. 55

<sup>11</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi Sosial dan Politik*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, (Yogyakarta: 2007), h. 65



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam politik anggaran yang mencerminkan kepentingan Pusat dan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah<sup>12</sup>

Kinerja keuangan pemerintahan daerah adalah kemampuan suatu daerah menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat. Pemerintahan daerah juga memiliki fleksibilitas dalam menggunakan dananya sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>13</sup>

Analisis rasio keuangan adalah laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Rasio keuangan di bedakan menjadi: rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Helfret (1991) yang menyatakan Kariyoto memahami rasio keuangan sebagai instrument analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa laludan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut untuk menunjukan risiko dan peluang yang melekat pada yang bersangkutan.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> ([http://www.google.comamp/.tribunnews.com/amp2016/01/27/\\_politik\\_anggaran\\_pemerintah](http://www.google.comamp/.tribunnews.com/amp2016/01/27/_politik_anggaran_pemerintah), Diakses pada 27 Januari, 2019)

<sup>13</sup> Syamsi,Ibnu, *Pokok-Pokok Kebijakan Perencanaan Pemrograman dan Penganggaran Pembagian Tingkat Nasional dan Ragional*, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), h. 85

<sup>14</sup> Kariyoto, *Analisis Laporan Keuangan*, (Surabaya: Universitas Brawijaya Press, 2017), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi yang luasa daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.<sup>15</sup>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2010 mengenai Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2016, daerah mendapat kesempatan untuk mengurus dan mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan PBB secara mandiri diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) masih dilakukan berdasarkan pertimbangan incremental budget maka sering kali mengabaikan kinerja keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran pendapatan sering kali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin didapat agar pada tahap pelaporan realisasi anggaran diharapkan realisasi pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja memiliki sifat yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran sehingga kemungkinan anggaran belanja dibuat

<sup>15</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Erlangga 2002),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih besar dari potensi realisasi belanja yang sebenarnya. Penggunaan analisis kinerja keuangan sebagai alat keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial sedangkan pada lembaga politik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Maka ini perlu suatu perubahan yang mengacu pada pengguna analisis kinerja keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah.<sup>16</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Labuhan Batu Selatan sudah di anggarkan Rp.31,199,486,000, dengan Pos –Pos Anggaran dana Desa ke 52 desa di lima kecamatan yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Labuhan Batu Selatan TA 2016-2017 telah terealisasi sebesar Rp 24,959,588,800 atau 80 persen telah terlealisasi. 20 persen lagi atau sebesar Rp.6,239,897,200 masih dalam tahap proses pencairan ke rekening desa. Sedangkan dan desa tahap pertama sebesar 40 persen Rp 13,109,988,800, dan di tahap kedua 40 persen Rp 11,849,600,000 dengan jumlah Rp 24,959,588,800 sudah terealisasi ke 52 desa di lima Kecamatan Kota pinang, Torgamba, Kampung Rakyat, Silang Kitang, dan Sei Kanan Labuhan Batu Selatan. Maka dari dana yang sudah di transfer 80 persen untuk desa dari 52 desa hanya mendapatkan 479,992,092,000 yang seharusnya setiap desa mendaptkan 599,990,115,000. Kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi kinerja. Pelaksanaan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara

<sup>16</sup> M.Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, Edisi Revisi, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat kinerja melalui laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode laporan. Laporan realisasi anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komperatif.

**Table 1.1**  
**Realisasi Anggaran Kabupaten Labuhan Batu Selatan 2016-2017**

No.	Uraian	Tahun	
		2016	2017
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	RP.849,742,000,000,	Rp.910,346,000,000,
1.	Pendapatan asli daerah	Rp.41,169,000,000	Rp.43,456,000,000
3.	Lain-lain pendatan yang sah	Rp.54.267,248,555	Rp.92,275,000,000
<b>B.</b>	<b>BELANJA</b>	Rp.878,749,000,000	Rp.977,431,000,000
1.	Belanja operasi	-	-
2.	Belanja modal	Rp.268,353,355,409	-
3.	Belanja tak terduga	Rp.1,000,000,000	-
	Surplus / defesit	Rp.29,007,000,000	Rp.67,085,000,000
	Jumlah	Rp.2122,287,604,000	Rp.2090,593,000,000

Sumber : Data Badan pusat statistic Kabupaten Labuhan Batu Selatan 2019

Dari hasil realisasi diatas dapat di ketahui bahwa realisasi anggaran Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan dari hasil diatas dapat diketahui Anggaran Belanja Daerah meningkat drastis.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **"Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Berdasrkan Peraturan**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pemerintahan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun Anggaran 2016-2017”**

**B. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah ini maka perlu diadakan pembatasan masalah, hal ini bertujuan agar hasil peneliti terfokus pada apa yang diteliti. Adapun masalah yang akan diteliti adalah Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah terhadap desa-desa yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tahun anggaran 2016-2017.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tahun anggaran 2016-2017?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan ?

**Tujuan penelitian**

1. Mengetahui Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tahun anggaran 2016-2017

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

#### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Salah satu syarat pokok guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
2. Merealisasikan ilmu-ilmu yang di dapat di bangku perkuliahan dalam bentuk praktek
3. Sebagai bahan penelitian bagi penulis dan bermanfaat bagi penelitian yang sama atau permasalahan yang sama

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah ilmu yang membahas dan mempelajari tentang metode-metode atau cara-cara tertentu yang harus ada dalam melaksanakan penelitian untuk tujuan tertentu.

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang secara empiris di lapangan.<sup>17</sup> Tentang pelaksanaan kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya penulis memberikan gambaran yang jelas secara sistematis terhadap berbagai

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI pres, 1986), h. 35



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara.

#### 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara dan dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan jl.lintas simaninggir sosopan,21464, Sumatera Utara.

#### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri sama.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah dan Keuangan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara, ketua DPRD , Sekretaris Daerah (Sekda), Bupati, Kepala Desa

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang di pandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1990), h. 188

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2010), h. 106

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table 1.2**  
**POPULASI DAN SAMPLE**

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPLE	PERSENTASE
1.	Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Keuangan	1	1	100%
2.	Ketua DPRD	1	1	100%
3.	Badan Anggaran Keuangan Daerah	1	1	100%
4.	Kepala Desa	52	5	5%
5.	Bupati	1	1	100%
6.	Sekretaris Daerah	1	1	100%
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>10</b>	

Sumber Data Penelitian 2019

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data yang meliputi jumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku atas informasi lainnya. Sumber data penelitian ini terdiri:

- a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau langsung dari objeknya.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan
- c. Data tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar.

## 5. Metode Pengumpulan Data

## a. Observasi

Observasi yaitu cara pengumpulan dengan mengamati dan turun langsung lapangan terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian ini.

## b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu atau metode dengan cara bertanya langsung kepada responden dilapangan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara.

## c. Pustaka

Pustaka yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

## 6. Metode analisis data



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah data terkumpul dan dianalisa selanjutnya penulis menjelaskan data tersebut dengan metode deskriptif, yaitu peneliti yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. biasanya dalam penelitian ini peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>20</sup> Setelah itu data diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori sesuai dengan jenisnya. Kemudian di hubungkan dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang dibahas dengan mengemukakan kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

#### G. Sistematika penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penulisan ini serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang dibahas pada setiap bab, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

#### BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Pada bab ini akan menyajikan gambaran umum lokasi Penelitian, gambaran dan struktur organisasi pemerintahan daerah kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara.

<sup>20</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian teoritis mengenai pengertian Implementasi, Pengertian *Good Governance*, Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah, Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tahun anggaran 2016-2017, Faktor penghambat Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran untuk pihak yang terkait

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Labuhan Batu Selatan

Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan daerah otonom baru yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Labuhan Batu yang diresmikan pada tanggal 27 juli 2008 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan di Provinsi Sumatera Utara.

Labuhan Batu Selatan merupakan salah satu Kabupaten dari pemekaran Kabupaten Labuhan Batu yang di bagi menjadi Kabupaten yaitu Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara.<sup>21</sup>

Sejarah pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan diawali dari adanya aspirasi dan keinginan masyarakat Labuhan Batu Selatan untuk membentuk sebuah daerah yang mandiri. Sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam Labuhan Batu Selatan, DPRD Labuhan Batu Selatan selanjutnya merespon dan akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2005 pada tanggal 31 oktober 2005 tentang Persetujuan DPRD Labuhan Batu terhadap pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kemudian pada tanggal 10 maret 2005 Bupati Labuhan Batu mengeluarkan keputusan

---

<sup>21</sup> Buku Profil Labuhan Batu Selatan, 2019, h 2



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.135/226/PEM/2005 tantang penetapan Ibukota Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Utara. Pada tanggal 12 januari 2006 DPRD Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan keputusan No.1/K/2006 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Labuhan Batu. Hal tersebut diikuti dengan keluarnya surat Gubernur Sumatera Utara No.903/035/K/2006 tentang bantuan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara bagi calon Kabupaten Labuhan Batu Selatan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.<sup>22</sup>

Pemerintahan Daerah Labuhan Batu rupanya memberi perhatian seius terhadap wacana pemekaran tersebut. Tidak sekedar persetujuan pemikiran saja, pada tanggal 27 desember 2007 pemerintahan Labuhan Batu juga memberikan dukungan dana melalui keputusan Bupati No.903/452/pem/2007 tentang dukungan Dana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhan Batu (induk) bagi calon Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Utara di Kabupaten Labuhan Batu. DPRD Kabupaten Labuhan Batu juga tidak ingin ketinggalan, pada tanggal 5 mei 2008 DPRD Labuhan Batu memberikan dukungan penuh melalui Keputusan Nomor 08 Tahun 2008 tentang dukungan Dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhan Batu (induk) bagi calon Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Utara di Kabupaten Labuhan Batu. Kemudian disusul dengan surat Gubernur Sumatera Utara No.135/0191 tanggal 24 juni 2008 perihal bantuan Dana

---

<sup>22</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi calon Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut pemerintah selanjutnya melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Utara. Setelah menempuh proses yang panjang akhirnya pada tanggal 21 juli 2008 Labuhan Batu Selatan resmi menjadi sebuah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini di sahkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhiono.<sup>23</sup>

#### B. Letak dan Keadaan Geografis Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan salah satu yang berada di kawasan pantai timur Sumatera Utara. Secara Geografis Kabupaten ini berada pada 1 C 26'00"-2 C 12'55" Lintang utara dan 99 C'40"00-100 C 26'00" Bujur Timur. Pada umumnya Kabupaten Labuhan Batu Selatan berada pada ketinggian dibawah 100 m-500 m diatas permukaan laut hanya terdapat di Kecamatan sungai Kanan tepatnya pada bagian Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara. Area Kabupaten Labuhan Batu Selatan di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Labuhan Batu, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hillir Provinsi Riau, sedangkan disebelah selatan berbatasan dengan

---

<sup>23</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rokan hulu dan Kabupaten Padang Lawas Utara, dan disebalah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Total luas wilayah Kabupaten Labuhan Selatan sekitar 4.35% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah 311.600 Ha yang terdiri dari 5 Kecamatan 52 Desa dan 2 Kelurahan defenitif. Adapun luas wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan ialah sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Luas wilayah Labuhan Batu Selatan berdasarkan Kecamatan**

Kecamatan		Luas(km)	Persentase(%)	Desa	Kelurahan
1	Sungai Kanan	484,35	15,54	8	1
2	Torgamba	1136,40	36,47	14	-
3	Kota Pinang	482,40	15,48	14	1
4	Silangkitang	303,70	9,75	9	-
5	Kampung Rakyat	709,15	22,76	15	-
Jumlah/total		3116,00	100,00	52	2

Sumber Data Badan Pusat Statistik 2019

**C. Keadaan Demografi Labuhan Batu Selatan**

**1) Jumlah penduduk**

Tahun 2019 jumlah penduduk di Labuhan Batu Selatan 309.173 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 98 jiwa per Km dimana jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak di bandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table 2.2**

**Jumlah penduduk Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

No	Kecamatan	Jenis kelamin		Jumlah	Sex ratio
		Pria	Wanita		
1	Kota Pinang	31,173	30,149	61,322	103,40
2	Kampung Rakyat	30,441	29,154	59,595	104,41
3	Torgamba	58,840	55,798	114,638	105,45
4	Sei Kanan	26,886	26,257	23,143	102,40
5	Silangkitang	16,050	15,633	31,683	102,67
Jumlah		163,390	156,991	320,381	104,08

Sumber Data Badan Pusat Statistik 2019

**a. Mata Pencarian**

Mata pencarian bagi masyarakat merupakan faktor yang sangat penting sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, begitu pula bagi masyarakat Labuhan Batu Selatan. Dimana pada umumnya mata pencarian masyarakat Labuhan Batu Selatan masih bergantung pada keadaan alam. Tepatnya mata pencarian masyarakat Labuhan Batu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table 2.3**  
**Mata pencaharian masyarakat Labuhan Batu Selatan**

No	Jenis pekerjaan	Jumlah/orang
1	Petani	1653
2	Buruh	670
3	Nelayan	93
4	Pedagang/Wirasewasta	550
5	Pegawai Negeri/Honor	815
6	Dan lain-lain	310
<b>Jumlah</b>		4091

Sumber BPS dan BAPPEDA Kabupaten Labuhan Batu Selatan 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian atau jenis pekerjaan penduduk yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang terbanyak adalah berprofesi sebagai petani terutama petani kelapa sawit dan karet dengan jumlah 1653 orang, kemudian buruh dengan jumlah 670 orang, kemudian disusul dengan profesi sebagai pedagang/wiraswasta dengan jumlah 550 orang, profesi pegawai negeri/honorer dengan jumlah 815 orang, dan yang paling sedikit yaitu profesi sebagai nelayan yaitu dengan jumlah 310 orang.<sup>25</sup>

## 2) Tingkat Pendidikan

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang berbudi luhur, berkepribadian, pekerja keras, tangguh, dan tanggung jawab. Selanjutnya pendidikan akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan

<sup>25</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk umumnya begitu juga dengan penduduk Labuhan Batu Selatan. Untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk Labuhan Batu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Table 2.4**  
**Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah/orang
	Belum atau tidak sekolah	910
	Tamat SD	1230
	Tamat SMP	870
4	Tamat SMA	977
5	Tamat Akedemik/Perguruan Tinggi	540
<b>Jumlah</b>		<b>4527</b>

Sumber Data Badan Pusat Statistik 2019

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Selatan banyak yang hanya tamatan SD dari pada yang bergelar Sarjana. Dari sini dapat kita lihat bahwa Kabupaten Labuhan Batu Selatan Kurang dalam masalah pendidikan.

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa penduduk Labuhan Batu Selatan sebagian besar mendapatkan pendidikan formal. Tingginya tingkat pendidikan formal suatu masyarakat sesungguhnya tidak terlepas dari sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di Labuhan Batu Selatan. Untuk lebih lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Labuhan Batu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Ibid



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table 2.5**

**Jumlah sarana pendidikan di Labuhan Batu Selatan**

No	Sarana pendidikan	Jumlah
1	SMA/SMK	70
2	SMP/MTS	96
3	SD	216
4	TK	79

Sumber Data Badan Pusat Statistik 2019

**3) Agama**

Sebagai pegangan hidup dan bimbingan dalam menempuh segala fenomena kehidupan, agama sangatlah diperlukan bagi setiap masyarakat, apalagi aturan hukum kerap kali tidak menjangkau wilayah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, maka dari itu peran agamalah yang sangat menentukan keterlibatan kehidupan masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Untuk mengetahui keadaan agama masyarakat di Labuhan Batu Selatan dapat kita lihat pada tabel berikut.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table 2.6**  
**Jumlah Agama Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	84,09
2	Kristen	15,63
3	Hindu	0,27
4	Budha	0,01
<b>Jumlah</b>		<b>100,0</b>

Sumber Data Badan Pusat Statistik 2019

**4) Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

Dasar hukum pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah undang- undang No.22 Tahun 2008 dengan Ibukota daerahnya ialah Kotapinang. Pada tahun 2011-2015 Kabupaten Labuhan Batu Selatan diPimoin oleh Bapak H. Wildan Aswan Tanjung SH.MM dan Drs.H Maslin Pulungan MM sebagai Bupati dan wakil Bupati pertama di Labuhan Batu Selatan.kepemimpinan Bupati pertama ini berlanjut pada priode 2016-2020 dengan terpilihnya kembali pada pemilihan umum 2016 silam.<sup>28</sup>

Pada pemilu 2014 ada sebanyak 35 anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang terdiri dari 10 partai untuk priode 2014-2019. Seperti yang telah dijelaskan di atas Kabupaten Labuhan Batu Selatan terdiri 5 Kecamatan yakni:

1. Kecamatan Kota Pinang
2. Kecamatan Kampung Rakyat

<sup>28</sup> Ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kecamatan Torgamba
4. Kecamatan Sei Kanan
5. Kecamatan Silangkitang

Selain 5 Kecamatan tersebut terdapat juga 2 Kelurahan dan 52 desa. Kabupaten Labuhan Batu Selatan memiliki Lambang daerah sebagai identitas daerahnya. Adapun lambing daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2.1 Lambang Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Adapun makna dan arti lambang daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah sebagai berikut.<sup>29</sup>

1. Perisai bersegi lima dikelilingi warna putih, melambangkan bahwa Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan Daerah Otonom yang di bentuk berazaskan Pancasila dan UUD 1945, sebagai cerminan

<sup>29</sup> Buku Profil Labuhan Batu Selatan, 2019, h. 5



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa masyarakat yang memiliki keinginan kuat untuk maju dalam naungan wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Padi 1 (satu) butir dengan 21 (dua puluh satu) butir & kapas dengan jumlah 8 buah, serta tali simpul 7, menunjukkan bahwa pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada tanggal 21 juli 2008 serta melambangkan rasa nasionalisme masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk bersama-sama membangun daerah berkecukupan sandang dan pangan menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.
3. Bintang, menunjukan masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan masyarakat yang religus dengan menjunjung tinggi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME
4. Pita merah bertuliskan Labuhan Batu Selatan adalah masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah masyarakat yang gigih dan menghargai jasa pejuang para pendahulu, namun tetap bersatu dalam jaminan silaturahmi dan persaudaraan.
5. Buah Pinang menggambarkan buah pinang yang didalamnya terdapat beberapa symbol sebagai perwujudan terhadap kota pinang sebagai cikal bakal wilayah Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sebagai mana diamanatkan UU No.22 Tahun 2008 Tentang pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan di Provinsi Sumatera Utara yang menyebutkan bahwa ibukota

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Labuhan Batu Selatan berada di Kecamatan Kota Pinang.

6. Karet, kelapa sawit, ikan Baung dan Udang Galah bermakna menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan daerah penghasil karet dan sawit sebagai potensi unggulan daerah. Sedangkan ikan Baung dan Udang Galah merupakan khas hasil daerah.
7. Simpang tiga menunjukkan bahwa Kota Pinang sebagai Ibukota Kabupaten Labuhan Batu Selatan di 3 jalur lintas Sumatera Utara yang menghubungkan 3 provinsi (Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat) dan merupakan lokasi strategis serta tempat transit berbagai kegiatan yang dapat menunjang kehidupan perekonomian masyarakat.
8. Warna biru langit, menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Selatan senantiasa berada dalam kedamaian dan ketentraman
9. Warna dasar kuning, menunjukkan bahwa Kabupaten Labuhan Batu Selatan dalam sejarahnya merupakan daerah yang pernah mengalami zaman keemasan melalui kesultanan yang pernah ada dahulu dan Kota Pinang menjadi pusat perdagangan melalui lintasan pelayaran di sungai barumun.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Implementasi

##### 1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.<sup>31</sup> Hal itu sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr dimana mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil. Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir yaitu tercapai dan tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.<sup>32</sup>

##### 2. Faktor Keberhasilan Implementasi

Sebagaimana telah dikatakan oleh pakar, bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran. Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi diperlukan kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaannya. Keberhasilan kebijakan implementasi ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan dan penerapan

<sup>31</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 139

<sup>32</sup> *Ibid*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan dengan desain tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

D.L Weimer dan Aidan R Vining menyatakan setelah mempelajari berbagai literature tentang implementasi menurut mereka ada 3 faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu:<sup>33</sup>

1. informasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk penyatuan pemahaman visi dan misi dan kebijakan yang dirumuskan. Terjadinya kekurangan informasi maka dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakan.
2. Isi kebijakan implementasi dapat dikatakan gagal karena masih samarnya isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak memiliki ketetapan dan ketegasan dalam bentuk internal maupun eksternal dari kebijakan itu sendiri.
3. Dukungan, sebuah kebijakan akan sangat sulit dilaksanakan jika tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut.
4. Pembagian potensi yaitu pembagian potensi antar aktor pelaksana dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan deferensasi tugas dan wewenang.

<sup>33</sup> Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 59

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah kebijakan tidak lepas begitu saja. Kebijakan harus di awasi dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut sebagai evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan biasanya di tujukan untuk menilai sejauh mana keefektifitasan kebijakan guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya dimana tujuan telah tercapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang ada dilapangan.

### 3. Tujuan Implementasi

Tujuan implementasi seperti yang disebutkan sebelumnya implementasi merupakan aktifitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Mengacu kepada implementasi tersebut adapun beberapa tujuan implementasi adalah:<sup>34</sup>

- 1.Untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat baik oleh individu maupun kelompok.
- 2.Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapann rencana atau kebijakan.
- 3.Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai didalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
- 4.Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.

---

<sup>34</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

### B. Good Governance

#### a. Pengertian *Good Governance*

Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Pinto dalam Nisjar mengatakan bahwa “*Governance*” adalah praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintah secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.<sup>35</sup>

Lembaga Administrasi Negara mengartikan *Governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services*. Lebih lanjut Lembaga Administrasi Negara menegaskan dilihat dari segi *functional aspect*, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

#### b. Karakteristik *Good Governance*

United Nations Development Programme pada paper pertamanya mengidentifikasi karakteristik sistem pemerintahan

<sup>35</sup> Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 198



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baik (the characteristics of good system of governance), yaitu sebagai berikut.<sup>36</sup>

1. *Participation*, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dalam berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of Law*, kerangka hukum adil dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. *Responsiveness*, lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap “*stakeholders*”.
5. *Consensus orientation, good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

---

<sup>36</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. *Equity*, semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and efficiency*, proses dalam lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
8. *Accountability*, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga "stakeholders."
9. *Strategic Vision*, para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.<sup>37</sup>

#### c. Unsur Good Governance

Menurut Bhatta ada 4 (empat) unsur utama dalam *good governance* yaitu.<sup>38</sup>

##### 1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak efisien atau ada prosedur yang tidak diperlukan.

#### 2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di Tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijaksanaan publik dan implementasinya. Dengan kata lain, segala kebijakan dan implementasi kebijakan baik di pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.

#### 3. Keterbukaan (*Openes*)

Keterbukaan mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat terbuka dan transparan dalam memberikan data dan informasi yang memadai bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan. Dalam praktik sering ditemukan, bahwa prosedur “tender” kompetitif suatu proyek pembangunan hingga penetapan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan, pemenangnya masih sering bersifat tertutup. Rakyat atau bahkan para pelaku tender dengan pemerintah sering tidak memperoleh penjelasan informasi tentang hasil atau kriteria penetapan pemenang tender proyek yang bersangkutan.<sup>39</sup>

#### 4. Kerangka hukum(*rule of law*)

Prinsip *rule of law* diartikan, “*good governance*” mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan. Karenanya, setiap kebijakan publik dan peraturan perundangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya. Masyarakat membutuhkan dan harus dapat diyakinkan tentang tersedianya suatu proses pemecahan masalah mengenai adanya perbedaan pendapat (*conflict resolution*), dan terdapat prosedur umum untuk membatalkan sesuatu peraturan atau perundang-undangan tertentu.<sup>40</sup>

Pemerintahan yang baik dengan demikian dapat disimpulkan sebagai pemerintahan yang mampu mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pengawasan (*kontrol*) dan jika dalam praktiknya telah merugikan kepentingan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggung jawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut.

#### d. Asas-asas *Good Governance*

Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, penyelenggaran pemerintah disamping secara konsisten taat hukum perlu memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yang antara lain disebutkan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang meliputi asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.<sup>41</sup>

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.
3. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi

<sup>41</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Afika, 2012), h. 241

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

4. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.<sup>42</sup>
5. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>43</sup>

#### C. Pemerintahan Daerah

Pemerintah dalam Bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagai isinya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota.<sup>44</sup>

Lain halnya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintah dalam arti

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 241-242

<sup>44</sup> Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2010), h. 11



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.<sup>45</sup>

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>46</sup>

#### D. Otonomi Daerah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas Desentralisasi dalam penyelenggaran pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah yang menyelenggarakan otonomi daerah.<sup>47</sup> Dalam menyelenggarakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah

<sup>45</sup> Fahmi Amrusi, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Nusamedia: Bandung, 2012) h. 28

<sup>46</sup> Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Pusat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990) h. 25

<sup>47</sup> Abu Samah, *Hukum Pemerintah Daerah dan Desa di Indonesia*, (Pekanbaru: 2016), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan program pemberdayaan masyarakat dimana program ini di percaya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat desa dengan kota di Indonesia. Menurut Begir Manan, Desentralisasi adalah setiap bentuk atau tindakan memencarkan kekuasaan atau kewenangan dari suatu Organisasi, jabatan, pejabat.<sup>48</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjaja otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Sudi Fahmi, *Konsisten Hukum antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Total Media, 2010) h. 42

<sup>49</sup> Sri Soemantri, *Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h. 29

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ( APBD)

#### 1. Anggaran

Dibawah ini ditunjukkan beberapa pengertian anggaran antara lain:

- a) Anggaran dalam arti "*begrooting*" atau "*estimate*" mempunyai makna "penentuan" "patokan" atau "penetapan besarnya uang."<sup>50</sup>
- b) Anggaran merupakan pernyataan mengenai etimasi kinerja yang hendak dicapai selama priode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.<sup>51</sup>

Dari beberapa pengertian Anggaran sebagaimana diatas maka dapat disimpulkan bahwa Anggaran pada umumnya memiliki karateristik sebagai berikut.<sup>52</sup>

- a) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
- b) Anggaran umumnya mencakup jangka dalam satu tahun.
- c) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manejer setuju untuk menerima tanggung jawab guna mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.
- d) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran.

<sup>50</sup> Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Negara*, (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 1995), h. 25

<sup>51</sup> Mardiasmo, *Akutansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 102

<sup>52</sup> Bastian, *Sistem Akutansi Sektor Publik, Konsep Untuk Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Lemba Empat, 2002) h. 81



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu.
- f) Secara berkala kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

## 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan cermin dari pilihan-pilihan ekonomis dan sosial masyarakat suatu daerah, untuk menjalankan peran yang dimandatkan masyarakat untuk menjadikan pilihan-pilihan tersebut. Pemerintah daerah harus melaksanakan fungsi pertama, pengumpulan sumber daya yang mencakup dengan cara yang tepat, dan kedua pengalokasian dan penggunaan sumber daya tersebut secara responsive, efisien dan efektif. Fungsi pertama berkaitan dengan sisi penerimaan (pendapatan) dari APBD sedangkan fungsi kedua dari sisi pengeluaran (belanja).<sup>53</sup>

Pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas menjalankan mandat dari rakyat membutuhkan biaya yang besar. Untuk pembiayaan tersebut pemerintah daerah mempunyai beberapa sumber penerimaan daerah yang di tuangkan dalam anggaran. Anggaran yang dibuat mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga akan terlihat.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Nadaek, *Analisis Rasio Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: MEP UGM, 2003), h. 11

<sup>54</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Adanya pertanggung jawaban pemungutan pajak dan ungutan lain-lain oleh pemerintah misalnya untuk memperlancar ekonomi.
- a) Adanya hubungan yang erat antara fasilitas pengguna dana dan penarikannya.
- b) Adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pola tingkat distribusi penghasilan dalam ekonomi.

Dibawah ini di tunjukkan beberapa pengertian APBD antara lain:

- a) Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah” Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.
- b) Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut Mamesah pada orde baru adalah” Rencana Operasional Keuangan daerah dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek Daerah dalam satu Anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.<sup>55</sup>

Defenisi menurut mamesah mengandung unsur :<sup>56</sup>

- Rencana oprasional Daerah yang menggambarkan adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dimana aktivitas tersebut telah diuraikan secara rinci.
- Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang ada merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- Dituangkan dalam bentuk angka, jenis kegiatan,dan jenis proyek.
- Untuk keperluan satu tahun Anggaran yaitu April sampai dengan Maret dan Januari sampai dengan Desember.

### 3. Karateristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Karateristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Abdul Halim antara lain.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Negara*, (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 1995), h 20

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> Halim Abdul, *Akutamsi Keuangan Daerah, Seri Akutansi Sektor Publik*, Edisi 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h.17



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun DPRD bersama-sama Kepala Daerah.
- b. Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan Anggaran adalah pendekatan tradisional (*line item*) yaitu Anggaran disusun berdasarkan jenis penerimaan dan jenis pengeluaran. Oleh karena itu, setiap baris dalam APBD menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tradisional diantara berbagai pendekatan penyusunan anggaran.
- c. Siklus APBD terdiri atas Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, dan penghitungan APBD merupakan pertanggung jawaban APBD. Pertanggung jawaban ini dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintahan Daerah Tingkat 1 dan Kepala Gubernur untuk Pemerintahan Daerah Tingkat II. Oleh karena itu pertanggung jawaban bersifat vertikal.
- d. Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan dan tahap penyusunan dan penentuan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/audit bersifat keuangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini tampak pada pengawasaan Pendapatan Daerah dan Pengawasan Pengeluaran Daerah.

- e. Pengawasan terhadap pengeluaran Daerah dilakukan berdasarkan 3 unsur yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan efesiensi, dan unsur hasil program (untuk proyek-proyek Daerah).
- f. Sistem akuntansi Keuangan Daerah menggunakan tata buku Anggaran yaitu Anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

#### 4. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Mamesah antara lain:<sup>58</sup>

- a) Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat Daerah yang bersangkutan.
- b) Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan ekonomi yang nyata dan bertanggungjawab.
- c) Memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah umumnya dan kepada Daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijakan Pemerintah Daerah.

<sup>58</sup> Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Negara*, (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 1995), h. 18

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap Daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
- e) Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah didalam batas-batas tertentu.

### **5. kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

kinerja keuangan merupakan prestasi yang dapat dicapai pada Anggaran yang telah dibuat Daerah dengan menganalisis perbedaan antara realisasi dengan target yang di Anggarkan baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sehingga dapat dihasilkan tingkat efektivitas dan efesiensi tertentu sesuai dengan kinerja keuangan yang telah di tetapkan.

Penilaian laporan kinerja keuangan diukur berdasar pada anggaran yang telah di buat.penilaian tersebut dilakukan dengan mengenal varians (selisish/perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang di anggarkan.<sup>59</sup>

<sup>59</sup> Mardiasmo, *Akutansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 123



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **6. Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

### **1. Efisiensi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Pengertian efisiensi menurut Jones dan Pendlebury adalah suatu perbandingan atau rasio antara output dan input.<sup>60</sup>

Rasionalitas hampir selalu berkaitan dengan efisiensi artinya secara ekonomis suatu tindakan dikatakan rasional bilamana tindakan itu ada kaitannya dengan usaha mencapai hasil sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya. Maka didalam proses penganggaran mulai diarahkan untuk berorientasikan pada hasil melalui pengukuran efisiensi.

## **4. Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan.<sup>61</sup>

Efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam Bahasa sederhana Bahasa tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Efektivitas berfokus pada *output* atau hasil. Suatu organisasi atau program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diinginkan.

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif

<sup>60</sup>Jones Rowan dan Pendlebury, *Public Sektor Accounting*, Edisi 5, (Yogyakarta: Pustaka, 1996), h. 280

<sup>61</sup>*Op. Cit*, h. 132

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perbandingan antara keluaran (*output*) dengan tujuan sehingga untuk mengetahui efektifitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kurang terlaksana dengan baik. Karena ada Anggaran keuangan Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang belum terlaksana secara efektif efisien dan ekonomis dalam pelaksanaannya.
2. Faktor yang dapat mempengaruhi sehingga kurang terlaksananya Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah yaitu hambatan struktur birokrasi, Sumber daya manusia yang seringkali didapati pegawai yang dibutuhkan tidak berada ditempat dan sumber daya manusia yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan, kurangnya komunikasi antar bidang bahkan antar SKPD.

#### B. SARAN

Saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Kepada Kepala Dinas Pendapatan keuangan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan agar melakukan atau melaksanakan Anggaran sesuai dengan Keuangan Daerah Labuhan Batu Selatan

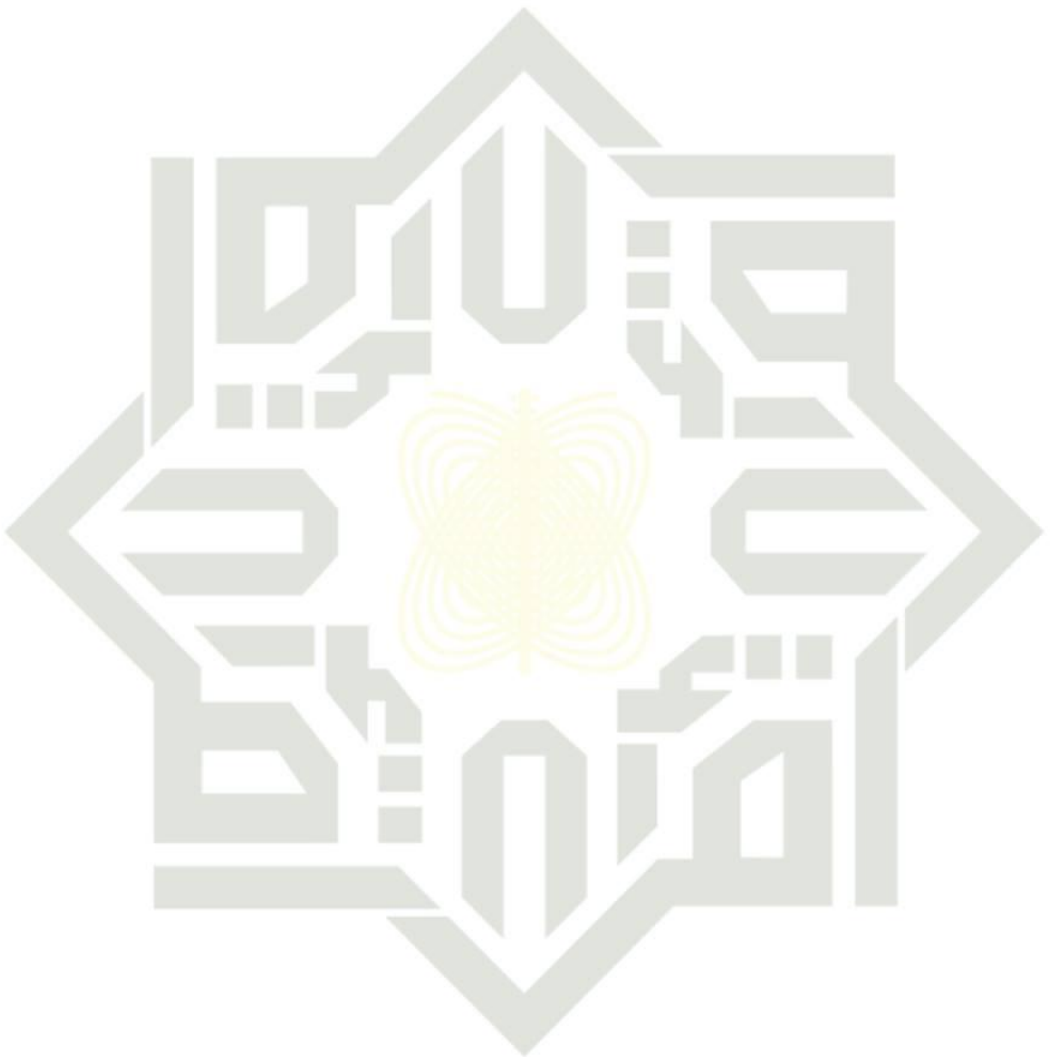




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan agar melakukan pengawasan terhadap Anggaran Keuangan Kabupaten Labuhan Batu Selatan



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abd Samah, *Hukum Pemerintah Daerah dan Desa di Indonesia*, (Pekanbaru: 2016)
- Almad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2010)
- Am Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017)
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990)
- Bastian, sistem Akutansi Sektor Publik, Konsep Untuk Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Salemba Empat, 2002)
- C.S.T KANSIL, *Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008)
- Fahmi Amrusi, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Nusamedia: Bandung, 2012)
- Halim Abdul, *Akutansi Sector Public, Akutansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002)
- Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Inu Kencana syafie, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Refika Aditama, 2010)
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Pusat*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990)
- Jones, Rowan dan Pendlebury, *Publik Sektor Accounting*, Edisi 5, (Yogyakarta: Erlangga, 1996)
- Kariyoto, *Analisis Laporan Keuangan*, (Surabaya: Universitas Brawijaya, Press, 2017)
- Lee Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Mansun , *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Erlangga, 2006)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Memesah, *Sistem Administrasi Keuangan Negara*, (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 1995)
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002)
- Mahmudi, *Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi Sosial dan Politik*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007)
- M Nafarin, *Penganggaran Permasalahan Edisi Revisi* (Jakarta: Salemba Empat, 2000)
- Nadaek, *Analisis Rasio Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: MEP UGM, 2003)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Sri Soemantri, *Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Sudi Fahmi, *Konsisten Hukum antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Total Media, 2010)
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Syaiful ibnu, *Pokok-Pokok Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Pembagian Tingkat Nasional dan Regional* (Jakarta: CV rajawali, 1986)

## INTERNET

Penkab Labusel, sejarah Labuhan Batu Selatan,  
[Http://www.labusel.com/2013/04/sejarah-Labuhan Batu Selatan.html?m=1](http://www.labusel.com/2013/04/sejarah-Labuhan-Batu-Selatan.html?m=1)  
 /diakses pada tanggal 31 Juli 2019

([http://www.google.com/amp/tribunnews.com/amp2016/01/27/politik anggaran /](http://www.google.com/amp/tribunnews.com/amp2016/01/27/politik-anggaran/)  
 diakses pada tanggal 31 Juli 2019

Buku Profil Labuhan Batu Selatan, 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

PP Nomor 58 tahun 2005 tentang asas umum pengelolaan daerah

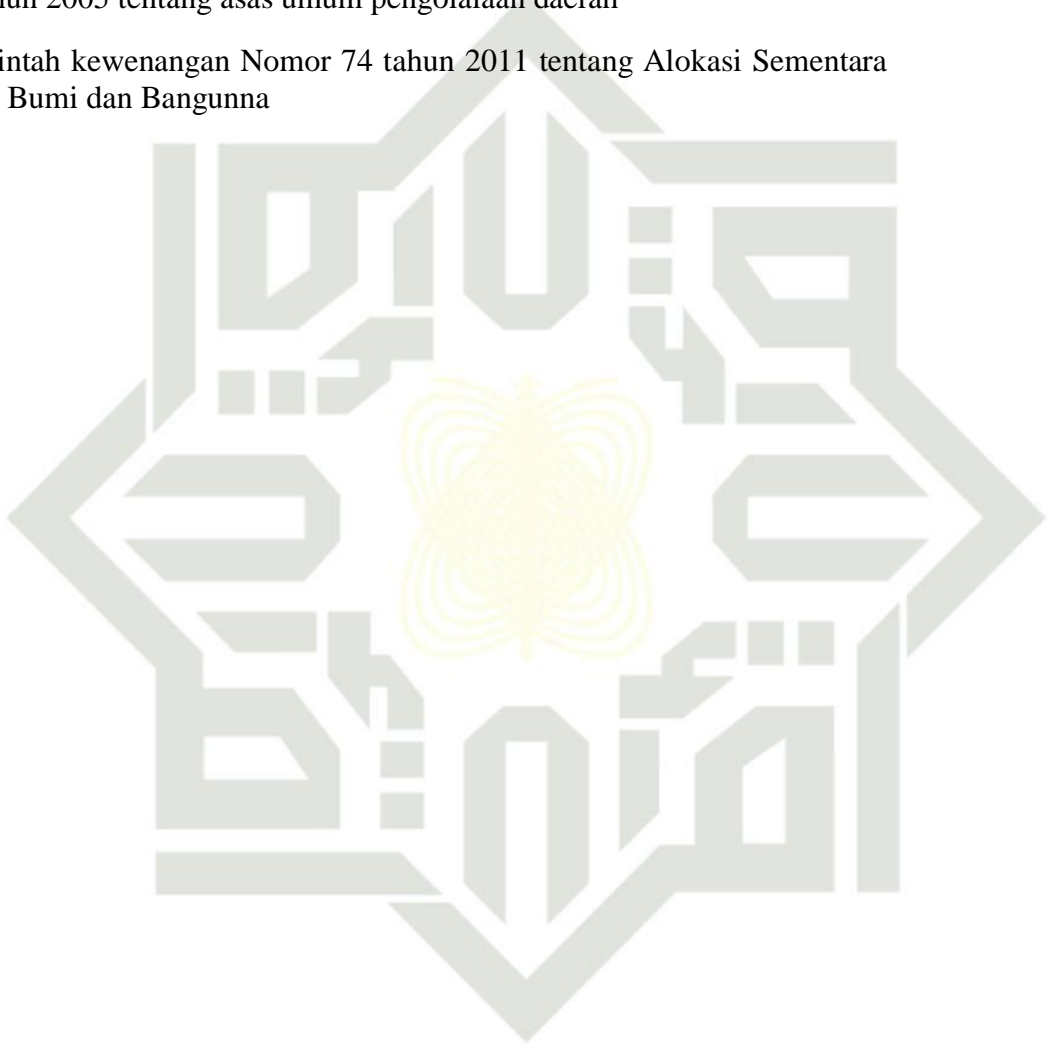
Peraturan pemerintah kewenangan Nomor 74 tahun 2011 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunna

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “ PELAKSANAAN ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAHAN DAERAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016-2017” yang ditulis oleh : -

Nama : MADINAH PANDIANGAN  
NIM : 11527205087  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2020M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr.H.Magfirah,MA**

Sekretaris  
**Musrifah,SH,MH**

Penguji I  
**Basir, S.HI., MH**

Penguji II  
**Firdaus, SH., MH**

Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus,S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1023

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web <http://fasih.uin-suska.ac.id> E-mail : [fsihuinriau@gmail.com](mailto:fsihuinriau@gmail.com)

Un.04/F.I/PP.00.9/5698/2019

Pekanbaru.05 Juli 2019

Biasa  
1 (Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada  
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama :MADINAH PANDIANGAN  
NIM :11527205087  
Jurusan :Ilmu Hukum S1  
Semester :VIII (Delapan)  
Lokasi :Kabupaten Labuhan Batu Selatan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan  
Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan  
Daerah Tahun Anggaran 2016-2017

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan:  
Rektor UIN Suska Riau





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/24021  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pemohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/5698/2019 Tanggal 5 Juli 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

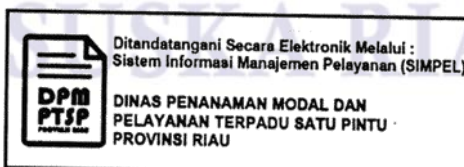
1. Nama : **MADINAH PANDIANGAN**
2. NIM / KTP : **11527205087**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **KAMPAR**
6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN ANGGARAN KEUANGAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAHAN DAERAH NOMOR 58 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016-2017**
7. Lokasi Penelitian : **1. DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN KEUANGAN KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN  
2. DPRD KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN  
3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 5 Juli 2019



#### Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
3. Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

Hak Cipta Diturunkan Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lintas Simaninggir Kotapinang  
KOTAPINANG

Kode pos : 21464

### REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/19 /BKBP/2019

Berdasarkan Surat dari Dekan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/5698/2019, Tanggal 05 Juli 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian yang akan dilakukan oleh :

Nama	:	<b>Madinah Pandiangan</b>
Alamat	:	<b>Simaninggir, Kotapinang</b>
NIM	:	<b>11527205087</b>
Pekerjaan	:	<b>Mahasiswi</b>
Judul penelitian	:	<b>Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016-2017</b>
Tujuan Penelitian	:	<b>Mendapatkan Data-Data Dalam Rangka Menyelesaikan Tugas Akhir Perkuliahan</b>
Lokasi Penelitian	:	<b>-Dinas Pendapatan Daerah dan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.</b>
	:	<b>-DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.</b>
	:	<b>-Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.</b>
Anggota Penelitian	:	<b>-</b>
Lama Penelitian	:	<b>08 Juli 2019 - 08 Oktober 2019</b>
Bidang Penelitian	:	<b>Sumber Daya Manusia</b>
Status Penelitian	:	<b>Baru</b>

### MEMBERITAHUKAN BAHWA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberi izin atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Mematuhi Undang-undang dan Norma-norma yang berlaku dimasyarakat.
2. Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum pada saat kegiatan dilaksanakan.
3. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan diluar rekomendasi yang diberikan;
4. Apabila masa berlaku rekomendasi sudah berakhir sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, dapat diperpanjang kembali ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Demikian Rekomendasi ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Kotapinang, 9 Juli 2019

**Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**H. ZULKIFLI SIREGAR, S.Sos**  
**PEMBINA IV / a**  
**NIP : 19680803 199103 1 004**

Tembusan

1. Yth. Bpk Bupati Labuhanbatu Selatan (sebagai laporan)
2. Dikirimkan





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MADINAH PANDIANGAN**

NIM : **11527205087**

Program Studi: **ILMU HUKUM**

Judul : *Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016-2017*

Pembimbing : **Ilham Akbar S.HI,SH,MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 April 2020

Pimpinan Redaksi



**M. Alni Svahrin, SH., MH., CPI.**

NIK. 198804302019031010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Madinah Pandiangan, dilahirkan di Kabupaten Kota Medan Kecamatan Medan Denai pada hari Senin tanggal 21 April 1997 anak Pertama dari Lima bersaudara pasangan dari Murni Simamora dan Membang Pandiangan. Peneliti menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar di MIN Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada tahun 2009. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Kihajar Dewantara Kecamatan Kota Pinang dan tamat pada tahun 2012 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Kota Pinang pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015, peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri tepatnya di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Peneliti menyelesaikan kuliah Strata satu (S1) pada tahun 2020.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar maka saya bersedia di tuntutan dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala hukuman yang di ambil.

Pekanbaru, 27 April 2020

**Madinah Pandiangan**  
11527205087

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.